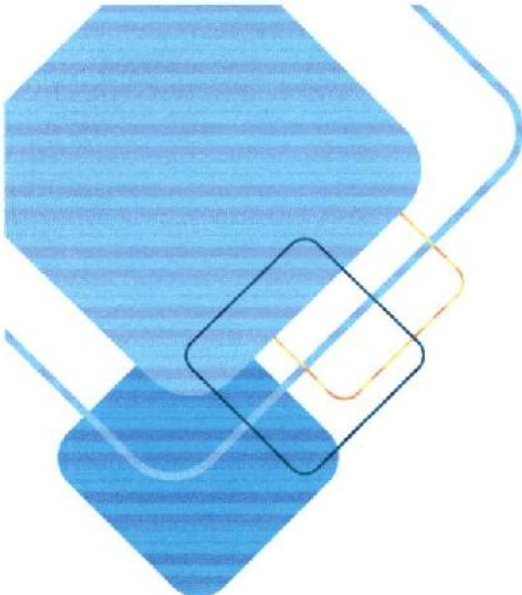
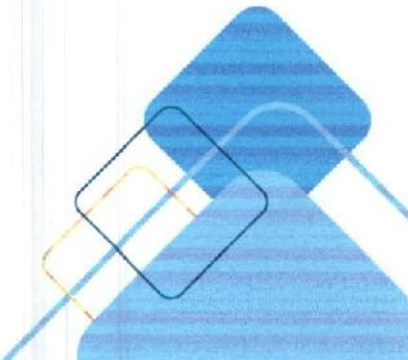




PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholder* terhadap pembangunan Kota Pangkal Pinang. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya.

Pangkal Pinang, 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Pangkal Pinang

The image shows a circular official stamp of the Pangkal Pinang Regional Office (Pemkot Pangkal Pinang) with a blue ink signature written over it. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG' and 'BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG'.

FAHRIZAL, S.T.,M.M
Pembina Tk I /IVb
NIP. 198502062008041001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada tahun 2025 ini ada sejumlah aturan yang membuat perubahan besar dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Adanya kebijakan di atas membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan, penyesuaian dan perubahan pada belanja yang tidak prioritas dan belanja yang hanya bersifat pendukung, termasuk perlunya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan Pilkada Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkal Pinang sehingga dapat menghasilkan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);

21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.3 Sistematika Perubahan RENJA 2025

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan:

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDMD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 59.557.913.215,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV									
						1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	-	050301	PROGRAM PENGUJANG URUSAN PERAKRATA KANDAHRAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kegiatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	58.830.634,954	89,89	955.492.988							89,890	955.492.988	100		3	Sekretariat	
				Nilai: SAOP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	77,80		0								0,000		0				Sekretariat
10		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase triwulannya laporan keuangan perangkat daerah sesuai LRA (Dengan Satuan: %)	100	57.443.349.083	25	871.702.577							25	871.702.577	25		2	Kasubag PEP dan Keuangan	
11		05030120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	32	57.443.349.083	29	871.702.577							29	871.702.577	96,667	1,518	Kasubag PEP dan Keuangan		
10			Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pencapaian tingkat kelengkapan disiplin ASN (Dengan Satuan: %)	99	20.000.000	0	0							0	0	0		0	Kasubag PEP dan Keuangan	
11			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	20.000.000	0	0							0	0	0,000		Kasubag PEP dan Keuangan		
18		050301204	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan: %)	100	266.186.600	25	32.494.884							25	32.494.884	25		12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
19		05030120401	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pemasangan Banjaran Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan banjaran Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	7.499.000	0	0							0	0	0,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian		
20		05030120402	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2.320.000	0	0							0	0	0,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian		
21		05030120404	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	63.970.000	0	0							0	0	0,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian		
22		05030120405	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	47.797.800	0	0							0	0	0,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian		
23		05030120409	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	0	32.494.884							0	32.494.884	0,000	21,880	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
24			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	6.100.000	10	0							10	0	0		0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
25			Pengadaan Peralatan dan Meubelairan	Jumlah Unit Peralatan dan Meubelairan yang Disediakan	1	6.100.000	0	0							0	0	0,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian		

24		050310188	Penyediaan Jasa Persewaan Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase: berakutannya jasa persewaan urutan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	298.955.673	25	46.127.909					25	46.127.909	25	14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
25		050310802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	30.000.000	0	5.103.913					0	5.995.813	0,000	11,636	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
26		05031208003	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perengkan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perengkan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	30.000.000	0	0					0	0	0,000	0,032	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
27		05031208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	108.495.679	0	30.321.094					0	30.321.094	0,300	17,886	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
28		05031209	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah	Persentase: barang milik pemerintah daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	105.833.392	25	11.157.014					25	11.157.014	25	91	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
29		05031209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	57.061.696	1	1.863.090					1	1.863.090	100,300	5,014	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
30		05031209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	27.302.000	4	3.918.490					4	3.918.490	100,300	14,249	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
31		05031209007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	21.421.696	1	4.378.614					1	4.378.614	100,000	20,584	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															49,919	1,644		
PREDIKAT KINERJA																		
32		050102	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	28	635.453.344	27	57.405.528					28,419	57.405.528	55	7	Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	49		49						49,000		100		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga keahliatan (Dengan Satuan:%)	100		84						84,060		84		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
				Persentase data ASN yang memiliki akses pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	8		0						0,000		100		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
				Persentase jumlah event yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		0						0,000		0		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
				Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	93		0						0,000		0		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
33		050302391	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase: tersampainya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberitahuan dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:%)	100	531.529.354	35	44.326.938					38	44.308.938	25	8	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	
34		050302391001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	73.426.000	0	0					0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Penganggaran	
35		050302391002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.900.000	0	0					0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	

36	05030220103	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PIS dan PPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PIS dan PPK (Dengan Satuan:Dokumen)	1	16.050.000	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkutan
37	05030220106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
38	05030220108	Fasilitas Lembaga Profesi ASH	Jumlah Lembaga Profesi ASH yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	164.780.000	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	
39	05030220109	Penyusunan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASH	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASH (Dengan Satuan:Dokumen)	1	243.445.284	0	41.388.928	0	41.388.928	0,000	16,853	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi		
40	05030220110	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	14.200.000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
41	05030220111	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000	0	3.289.900	0	3.289.900	0,000	21,847	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi		
42	050302202	Mutasi dan Promosi ASH	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASH (Dengan Satuan:3)	100	134.340.000	20	3.380.000	20	3.380.000	20	2	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian		
43	05030220201	Pengelolaan Mutasi ASH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASH antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	56.140.000	0	1.640.000	0	1.640.000	0,000	2,921	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian		
44	05030220202	Pengelolaan Kemutakhiran Pangkat ASH	Jumlah Pengelolaan Kemutakhiran Pangkat ASH (Dengan Satuan:Dokumen)	1	49.000.000	0	1.640.000	0	1.640.000	0,000	3,340	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkutan		
45	05030220203	Pengelolaan Promosi ASH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASH (Dengan Satuan:Dokumen)	1	27.220.000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
46	050302202	Pengembangan Kompetensi ASH	Persentase tersusunnya dokumen ASH yang meliputi pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:3)	100	122.649.000	23	9.816.600	23	9.816.600	23	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkutan		
47	05030220301	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASH	Jumlah ASH yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	20	10.000.000	6	6.326.400	6	6.326.400	30,000	65,166	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkutan		
48	05030220404	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASH	Jumlah ASH yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	5	69.000.000	0	3.380.000	0	3.380.000	0,000	4,754			
49	05030220407	Evaluasi Disiplin dan Sertifikasi Jabatan ASH	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin dan Sertifikasi Jabatan ASH (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.449.000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi	
50	05030220414	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASH Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	35	18.200.000	20	0	20	0	57,143	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkutan		
51	050302204	Perilaku dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan perilaku dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun (Dengan Satuan:3)	100	46.935.000	15	0	11	0	15	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi		
52	05030220403	Penilaian Perilaku dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	1	11.650.000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
53	05030220404	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASH yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	58	22.385.000	0	0	0	0	0	0,000	0,000		
54	05030220408	Pengelolaan Penyerentetan Pengawasan Disiplin ASH	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyerentetan Pengawasan Disiplin ASH (Dengan Satuan:Laporan)	1	13.000.000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											83,289	6,871		
PREDIKSI KINERJA														

56	-	990402	PROGRAM MANAJEMEN MANUSIA	PENGEMBANGAN SUMBER MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (dengan Satuan%)	30	911.825.000	33	3.280.000							33,120	3.280.000	100	1	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesenjangan Penguasaan
					Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (dengan Satuan%)	33		39								30,000		91		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesenjangan Penguasaan
57		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (dengan Satuan%)	100	91.950.000	15	0							25	0	25	8	
58		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Ikt, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi/ Penyelenggara Urutan Pemerintahan Kontur, Pesangkat, Daerah Perukung, dan Urutan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (dengan Satuan: Orang)	25	91.950.000	0	0							0	0	0,000	0,000	
59		050402202	Sertifikasi, Seleksi, dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, seleksi, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (dengan Satuan%)	100	499.825.000	10	1.280.000							20	1.280.000	20	1	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
60		05040220203	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi Regional, dan Pejabat Jabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi Regional, dan Pejabat Jabatan (dengan Satuan:Laporan)	1	499.825.000	0	1.280.000							0	1.280.000	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		49,909	0,954	
PREDIKAT KINERJA																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM (%)																		69,948	2,923	
PREDIKAT KINERJA																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan perencanaan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena ada anggaran Gaji Pokok PPPK Kota Pangkal Pinang yang dititipkan ke BKPSDMD															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:					Melaksanakan proses penilaian anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijabarkannya															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Strategis Daerah Kota Pangkal Pinang:					Melaksanakan proses penilaian anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijabarkannya															

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
MARET 2025

MARET 2025

KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
					RP	(%)			
EMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	30	ORANG	57.443.549.083		871.793.577	1,52	25	APBD Kota PKP
	Belanja gaji pokok PNS			1.468.525.711	-	411.107.000			
	Belanja gaji pokok PPPK			54.045.689.660	-	12.280.467			
	Belanja tunjangan keluarga PNS			163.907.855	-	43.175.614			
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			7.437.334		1.719.265			
	Belanja tunjangan jabatan PNS			90.763.750	-	33.400.000			
	Belanja tunjangan jabatan PPPK			8.635.000		0			
	Belanja tunjangan fungsional PNS			155.719.500	-	22.110.000			
	Belanja tunjangan fungsional PPPK			6.132.000		2.070.000			
	Belanja tunjangan fungsional umum PNS			28.166.250	-	5.900.000			
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			-		0			
	Belanja tunjangan beras PNS			99.373.522	-	24.912.480			
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			5.191.916		1.110.440			
	Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS			4.279.219	-	958.199			
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			22.802		0			
	Belanja pembulatan gaji PNS			20.650	-	5.262			
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			20.146		170			
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS			1.268.120.000	-	302.040.000			
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			12.000.000					
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			46.384.000	-	5.786.000			
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			29.305.596	-	4.651.920			
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1.712.988	-	251.880			
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN			2.141.184	-	314.880			

KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN RP	(%)	FISIK (%)		
1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1	PAKET	7.499.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.499.000	-	0				
2. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2	PAKET	2.320.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			1.020.000	-	0				
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			1.300.000	-	0				
3. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2	PAKET	63.570.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			24.339.700	-	0				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			16.215.300	-	0				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			20.570.000						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			-						
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.445.000						
4. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1	PAKET	42.797.800		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			42.797.800	-	0				
5. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1	LAPORAN	150.000.000		32.414.884	21,61	30	APBD Kota PKP	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			150.000.000	-	32.414.884				
1. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1	LAPORAN	90.000.000		9.905.813	11,01	25	APBD Kota PKP	
Belanja Tagihan Telepon			1.500.000	-	166.604				
Belanja Tagihan Listrik			88.500.000	-	9.739.209				
2. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1	LAPORAN	30.000.000		-	0,00	28	APBD Kota PKP	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			15.710.000	-	0				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			4.270.000						
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			6.570.000	-	0				
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			3.450.000						
3. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1	LAPORAN	168.965.676		30.221.696	17,89	25	APBD Kota PKP	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			8.500.000	-	800.000				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			14.235.500	-	0				
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			124.358.480	-	24.893.080				
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			21.271.696	-	4.378.616				
Belanja Jasa Pengolahan Sampah			600.000	-	150.000				

KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN RP	(%)	FISIK (%)		
1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1	UNIT	57.061.696		2.860.000	5,01	25	APBD Kota PKP	
Belanja Jasa Tenaga Supir			21.931.696	-	0				
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			1.800.000	-	0				
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			33.330.000		2.860.000				
2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4	UNIT	27.500.000		3.918.400	14,25	25	APBD Kota PKP	
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			8.000.000	-	2.168.400				
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			19.500.000	-	1.750.000				
3. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1	UNIT	21.271.696		4.378.616	20,58	33	APBD Kota PKP	
Belanja Jasa Tenaga Keamanan			21.271.696	-	4.378.616				
1. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1	UNIT	6.100.000			0,00	4	APBD Kota PKP	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			6.100.000	-					
1. PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	73.436.000		-	0,00	28	APBD Kota PKP	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.386.000						
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			30.000.000						
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.300.000						
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			10.000.000						
Belanja Paket/Pengiriman			500.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30.250.000						

	KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
						RP	(%)			
2	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	15.100.000		-	0,00	30	APBD Kota PKP	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.100.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
3	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	1	DOKUMEN	16.050.000		-	0,00	45	APBD Kota PKP	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.450.000						
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.400.000						
	Honorarium Rohaniwan			1.200.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
4	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	1	DOKUMEN	10.000.000		-	0,00	54	APBD Kota PKP	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
5	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	1	LEMBAGA	144.298.000		-	0,00	5	APBD Kota PKP	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			14.013.000						
	Belanja Pakaian Olahraga			110.985.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.300.000						
6	PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN	1	DOKUMEN	243.445.264		41.028.928	16,85	45	APBD Kota PKP	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			233.445.264		41.028.928				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
7	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	DOKUMEN	14.200.000		-	0,00	37	APBD Kota PKP	
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			9.200.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.000.000						
8	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	1	DOKUMEN	15.000.000		3.280.000	21,87	40	APBD Kota PKP	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000		3.280.000				

KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
					RP	(%)			
1. PENGELOLAAN MUTASI ASN	1	DOKUMEN	56.140.000		1.640.000	2,92	30	APBD Kota PKP	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			540.000						
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			4.500.000						
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			25.000.000						
Honorarium Penyelenggara Ujian			15.600.000						
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			-						
Belanja Paket/Pengiriman			500.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000		1.640.000				
2. PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	1	DOKUMEN	49.000.000		1.640.000	3,35	35	APBD Kota PKP	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			-						
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			22.000.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			27.000.000		1.640.000				
3. PENGELOLAAN PROMOSI ASN	1	DOKUMEN	29.200.000		-	0,00	19	APBD Kota PKP	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7.200.000						
Honorarium Rohaniwan			10.000.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.000.000						
1. PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	20	ORANG	10.000.000		6.536.600	65,37	66	APBD Kota PKP	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000		6.536.600				
2. PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	6	ORANG	69.000.000		3.280.000	4,75	30	APBD Kota PKP	
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			24.000.000						
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			30.000.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000		3.280.000				
3. EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	1	LAPORAN	25.449.000		0	0,00	5	APBD Kota PKP	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.400.000						
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			9.100.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.949.000						
4. FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	35	ORANG	18.200.000		0	0,00	66	APBD Kota PKP	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.600.000						
Honorarium Rohaniwan			1.600.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000						

KEGIATAN			VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)			
						RP	(%)				
1.	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1	DOKUMEN	11.650.000		-	0,00	49	APBD Kota PKP		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.650.000							
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000							
2.	PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	58	ORANG	22.285.000		-	0,00	5	APBD Kota PKP		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.985.000							
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.300.000							
3.	PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	1	LAPORAN	13.000.000		-	0,00	10	APBD Kota PKP		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.000.000							
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000							

LATIHAN

EMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5	ORANG	20.000.000		-	0,00	10	APBD Kota PKP	
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			20.000.000	-	0				

IER DAYA MANUSIA

1. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75	ORANG	91.950.000		-	0,00	5	APBD Kota PKP	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.360.000						
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			37.000.000						
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			18.000.000						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21.590.000						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	VOL	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
							RP	(%)			
2	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1	LAPORAN	499.875.000		3.280.000	0,66	5	APBD Kota PKP	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			113.300.000						
		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			366.575.000						
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20.000.000		3.280.000				
		Total sampai dengan bulan ini			59.557.913.215		1.016.178.514	2	28		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	3.90	100	100	0.825	82.5	100	83	83	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A		
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.8	-	-	-	7.05	0.233	23.33	7.05	0.212	21.2	7.8	27	100	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A		
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	0.36	36	100	0.45	45	100	39	39	47	N/A	N/A	47	N/A	N/A		
4.	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79	-	-	-	77	1.22	100	78	78	100	79	79	100	-	-	-	-	-	-		
5.	Persentase ASN yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	N/A	N/A	29	N/A	N/A		

	pendidikan dan pelatihan formal																				
6.	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	
7.	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	
8.	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	N/A	N/A	91	N/A	N/A	
9.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	N/A	N/A	25	N/A	N/A	
10.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2.6	1.47	56.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	61.50	35.68	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	23	71.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	116	113	97.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.728	1.728	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	83	84	85	82.5	83	83	84	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.5	7.8	22	23	24	21.2	22	22	23	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	47	49	50	45	47	47	49	
4	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi			78	79	0	0	0	78	79	0	0	
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0	0	30	31	33	0	0	30	31	
6	Persentase jumlah event yang dilaksanakan			0	0	100	100	100	0	0	100	100	
7	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN			0	0	7	8	8	0	0	7	8	

8	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan			0	0	92	93	94	0	0	92	93	
9	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			0	0	33	33	37	0	0	33	33	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
2. Penempatan Pegawai Secara Lebih Optimal Sesuai Kompetensi Serta Analisa Beban Kerja Dan Analisa Jabatan
3. Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian
5. Peningkatan Akurasi Data Pegawai
6. Peningkatan Kinerja SDM Aparatur
7. Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara (*Flexibel Working Arrangement*)

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Tersedianya sarana dan prasarana baik fisik maupun personil untuk penilaian kinerja ASN (Assessment center).
3. SDM Pengelola Kepegawaian yang berkompeten.
4. Pengembangan/dukungan sistem informasi yang terus dilakukan

2.4 Perubahan RKPD TAHUN 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

RPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2025	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	51.601.492.146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	51.601.492.146
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.80 Nilai			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.80 Nilai	
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	50.860.766.378	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	50.860.766.378
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	50.860.766.378	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	50.860.766.378
Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	302.341.700	Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	302.341.700
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.382.500	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.382.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.027.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.027.700
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.320.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.320.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.072.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.072.000

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	235.539.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	235.539.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	281.880.676	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	281.880.676
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	161.880.676	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	161.880.676
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	30.670.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	30.670.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.100.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.570.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.570.000

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	105.833.392	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	105.833.392
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	57.061.696	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	57.061.696
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.271.696	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.271.696
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-98%	20.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-98%	20.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	480.149.264	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	480.149.264
	Rasio pegawai fungsional	28%			Rasio pegawai fungsional	28%	
	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%			Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%	
	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	93%			Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	93%	
	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%			Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%	
	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	49%			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	49%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	329.244.264	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	329.244.264
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	56.436.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	56.436.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	5.100.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	5.100.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	6.050.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	6.050.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	-
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	14.013.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	14.013.000
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	233.445.264	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	233.445.264
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.200.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.200.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	73.570.000	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	73.570.000
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	48.390.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	48.390.000

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	7.980.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	7.980.000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	17.200.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	17.200.000
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	69.700.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	69.700.000
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	7.500.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	7.500.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	59.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	59.000.000
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	-	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	-
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	3.200.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	3.200.000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	7.635.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	7.635.000
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.650.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.650.000

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	58 Orang	2.985.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	58 Orang	2.985.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	538.675.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	538.675.000
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	54.400.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	54.400.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	75 Orang	54.400.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	75 Orang	54.400.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	484.275.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	484.275.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	484.275.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	484.275.000
			52.620.316.410				52.620.316.410

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari:
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Perumusan bahan kebijakan Pengadaan ASN
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - g. Pengelolaan data kepegawaian
 - h. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan mutasi ASN
 - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c. Pengelolaan promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

- c. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
- d. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
- e. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
- 2. Kegiatan Pendukung
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan aset tetap lainnya
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEBUDAYAAN / SUB KEBUDAYAAN	INDIKATOR PROGRAM / KEBUDAYAAN / SUB KEBUDAYAAN	TARGET AKHIR PERIOD RESTRUKTURISASI	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKARIR CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI TAHUN 2024	GAPAIAN KEMERJA DAN KERANGKA PEMDANAAN										PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN JAWAB	
							TARGET 2023			PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkas/Peraturan (15-12)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	21		
							SEBELUM	SEDANG	KEMUNDURAN	APRIL 2023	MEI 2023	JUN 2023				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							7.278.494.194,00	49.767.813.210,00	52.570.318.410,00	41.548.802.218,00							6.139.339.218,00			
	5	INDUK PEMULIHAN URUSAN PEMERINTAHAN							7.278.494.194,00	49.767.813.210,00	52.570.318.410,00	41.548.802.218,00							6.139.339.218,00			
	5.01	KETEGANGAN							6.078.261.194,00	58.946.688.715,00	57.141.641.410,00	45.863.344.314,00							5.193.339.218,00			
1.	5.01.01	PROGRAM PENGUKUH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	MISI SAKIP Perangkat Desa Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	77,88 80 80 80	77,88 80 80 80				5.138.386.194,00	58.130.634.911,00	51.641.442.145,00	-1.311.246.676,00							3.897.263.218,00			
	5.01.01.01	Pencapaian Pengembangan dan Kualitas Kerja Perangkat Desa	Pencapaian pengumpulan dokumen perencanaan, pengukuran dan pengumpul data yang terintegrasi dengan sistem aplikasi	100 %	100 %				8.675.306,00	0,00	0,00	-8.675.000,00							12.000.000,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Desa	3 Dokumen	3 Dokumen				1.855.000,00	0,00	0,00	-1.855.000,00	Kota Pengal Pang, Samudra Kamran, Samudra Kamran	PENDAPATAN TRANSFER	-				2.000.000,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1.866.000,00	0,00	0,00	-1.866.000,00	Kota Pengal Pang, Samudra Kamran, Samudra Kamran	PENDAPATAN TRANSFER	-				3.000.000,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1.860.000,00	0,00	0,00	-1.860.000,00	Kota Pengal Pang, Samudra Kamran, Samudra Kamran	PENDAPATAN TRANSFER	-				2.000.000,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				1.348.000,00	0,00	0,00	-1.348.000,00	Kota Pengal Pang, Samudra Kamran, Samudra Kamran	PENDAPATAN TRANSFER	-				2.000.000,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				1.876.000,00	0,00	0,00	-1.876.000,00	Kota Pengal Pang, Samudra Kamran, Samudra Kamran	PENDAPATAN TRANSFER	-				2.000.000,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pencapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat desa sesuai SAP	100 %	100 %				3.789.276.794,00	57.415.548.063,00	50.908.788.375,00	47.871.426.504,00							1.022.808.430,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.02.001	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pengal Masa Gaji dan Tunjangan ASN	34 Pengal dan	34 Pengal dan				3.787.364.794,00	57.403.548.063,00	50.908.788.375,00	47.871.427.504,00	Kota Pengal Pang, Samudra Kamran, Samudra Kamran	PENDAPATAN TRANSFER DAN TAMBAHAN DAFTARAN PENDANAAN ATAS KEMERJAAN PENGUSAHA PEKERJAAN SUDUTAN SUDUTAN SUDUTAN SUDUTAN	-				3.021.108.430,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				1.896.000,00	0,00	0,00	-1.896.000,00	Kota Pengal Pang, Samudra Kamran, Samudra Kamran	PENDAPATAN TRANSFER	-				2.000.000,00	BAGAN KETEGANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pencapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat desa	100 %	100 %				265.198.430,00	265.198.800,00	302.341.200,00	36.143.300,										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKREASI SPO	REALISASI CAPAIAN BENAR OPS TAHUN 2021	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET BENAR OPS TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARAAN PERKEMBANGAN										KELOMPOK SASARAN	PEKERJAAN MAJU KENDARAAN TAHUN 2021		PESANGKAT DARI PENGEMBANGAN JAMAR
							TARGET 2021		PAUO INDIKATOR (Rp)		Berkas/berkas/berkas (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAUO INDIKATOR (Rp)		
							SEBELUM	SEKUAL	RKPD 2021	APR 2021				RKPD PERUBAHAN 2021	NASIONAL			DAERAH	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bawak Cekam dan Pengantian yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.787.800,00	42.787.800,00	31.382.390,00	-21.415.300,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.03.008 Pemeliharaan Paket Koordinasi dan Koordinasi (KPPD)																				
			Jumlah Layanan Pemeriksaan Reger Kendaraan dan Koordinasi KPPD				1 Layanan	1 Layanan	150.000.000,00	150.000.000,00	239.576.300,00	85.536.300,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07		Pengadaan Bawak Mula Darah Perang (DPP)	Persentase pengadaan Bawak Mula Perang (DPP)				100 %	100 %	127.980.000,00	8.100.000,00	55.870.000,00	-65.210.300,00		-		Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.008 Pengadaan Model																				
			Jumlah Paket Model yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.008 Pengadaan Pasokan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Pasokan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.370.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	730.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.007 Pengadaan Asat Tetap Lainnya																				
			Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	28.000.000,00	0,00	24.810.000,00	-4.190.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.001 Pengadaan Bawak dan Peralatan Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Bawak dan Peralatan Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	74.520.000,00	0,00	0,00	-74.520.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08		Pemeliharaan Jasa Perbaikan Unit Perbaikan Darah	Persentase pemeliharaan Jasa Perbaikan unit perbaikan darah				100 %	100 %	885.000.000,00	289.000.000,00	281.880.000,00	-284.020.324,00		-		Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah	-		265.132.342,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.002 Pemeliharaan Jasa Perbaikan, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Layanan Perbaikan Jasa Perbaikan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Layanan	1 Layanan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.003 Pemeliharaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor																				
			Jumlah Layanan Perbaikan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan				1 Layanan	1 Layanan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			26.910.333,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.004 Pemeliharaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor																				
			Jumlah Layanan Perbaikan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan				1 Layanan	1 Layanan	445.000.000,00	180.000.000,00	181.880.000,00	-264.020.324,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.005 Pemeliharaan Bawak Mula Darah Perang (DPP)																				
			Persentase pemeliharaan Bawak Mula Perang (DPP)				100 %	100 %	340.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-235.000.000,00		-		Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah	-		180.731.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.006 Pemeliharaan Jasa Perbaikan, Bawak Perbaikan, dan Peralatan Perbaikan dan Peralatan Kantor atau Bangunan																				
			Jumlah Perbaikan dan Peralatan Perbaikan dan Peralatan Kantor atau Bangunan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.810.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	13.810.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			42.831.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.007 Pemeliharaan Jasa Perbaikan, Bawak Perbaikan, dan Peralatan Perbaikan dan Peralatan Kantor atau Bangunan																				
			Jumlah Perbaikan dan Peralatan Perbaikan dan Peralatan Kantor atau Bangunan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	154.220.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-127.220.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			62.490.413,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.008 Pemeliharaan Perbaikan dan Peralatan Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Perbaikan dan Peralatan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-123.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumat Karamah, Sumat Karamah	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah Akuisisi Reformasi Struktur dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE KENAIKATAN SPO	REALISASI CAPAIAN RENCANA KINERJA SPO TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA KINERJA SPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENCANA TARGET 2024		PENGANGKUT DAFTAR PENDANAAN JAWA B	
							TARGET 2024		PACU INDIKATIF (Rp)				Berkembang/Berkurang (10-50)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	30 OKTUBER	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	5.03.02	PROGRAM KOPERASISAN DAERAH	Rasio paguwal pendirian tinggi dan menengah/ dasar (PAB) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Rasio paguwal fungsional Rasio jabatan fungsional yang memenuhi/ tidak memenuhi Pembayaran data ASN yang tidak sesuai Pengembangan kompetensi ASN Pembayaran data paguwal yang memenuhi/ tidak memenuhi				100 % 25 40 8 80 % % % %	100 25 40 8 80 % % % %	874.733.000,00	835.453.264,00	480.148.264,00	487.402.264,00							1.432.128.000,00		
	5.03.02.3.01	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Informasi Kapasitas ASN	Pembayaran insentif/ dokumen pelaksanaan/ pencapaian/ verifikasi/ dan verifikasi/ pengesahan ASN Pembayaran insentif/ dokumen pelaksanaan/ pencapaian/ verifikasi/ dan verifikasi/ pengesahan ASN				100 %	100 %	811.347.000,00	531.826.264,00	329.244.264,00	-184.102.736,00			-				812.135.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0001	Pembayaran Sertifikat Penguasaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1/9.000.000,00	73.486.000,00	84.436.000,00	-123.254.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				85.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0002	Pembayaran Sertifikat Penguasaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	49.994.000,00	15.190.000,00	5.190.000,00	-44.804.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				40.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Penguasaan PAB dan PABK																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan PAB dan PABK				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	-15.350.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				30.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0004	Koordinasi dan Fasilitas Penguasaan PAB dan PABK																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan PAB dan PABK				1 Dokumen	1 Dokumen	23.389.000,00	10.000.000,00	3.000	-23.389.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				30.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0005	Fasilitas Lantai Penguasaan PAB dan PABK																			
			Jumlah Lantai Penguasaan PAB dan PABK yang Dikelola				1 Lantai	1 Lantai	180.000.000,00	144.268.000,00	14.015.000,00	-145.267.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				230.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0006	Pembayaran Sertifikat Penguasaan Data dan Informasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.001.000,00	243.443.264,00	233.443.264,00	373.444.264,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				328.410.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0007	Pengelolaan Sertifikat Penguasaan Data dan Informasi Kapasitas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan Data dan Informasi Kapasitas				1 Dokumen	1 Dokumen	30.279.000,00	14.200.000,00	9.200.000,00	-22.079.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				33.795.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.01.0008	Pengelolaan Sertifikat Penguasaan Data dan Informasi Kapasitas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan Data dan Informasi Kapasitas				1 Dokumen	1 Dokumen	16.362.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	-14.362.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				70.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pembayaran insentif/ dokumen pelaksanaan/ mutasi dan promosi ASN				100 %	100 %	218.262.000,00	534.549.000,00	73.579.000,00	-145.162.000,00			-				218.162.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan Mutasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	80.002.000,00	86.140.000,00	46.380.000,00	-41.812.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				85.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.02.0002	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Penguasaan Sertifikat Penguasaan Mutasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	46.000.000,00	1.000.000,00	-72.000.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				70.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.3.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguasaan Sertifikat Penguasaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	48.700.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	-31.700.000,00	Kota Pangreh Prah, Sema Kecamatan, Sema KatoDasa	PENDAPATAN TRANSFER	-				80.000.000,00	BADAN KOPERASISAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUTAN / BIDANG URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRASI OPD TAHUN 2023	PRAKTIKAS CAPAIAN TARGET / KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEMBINAAN										PRIORITAS MAJU BERKUALITAS TAHUN 2024		PERINGKAT DAERAH PENGEMBANGAN JAWAB	
							TARGET 2025		KINERJA 2025		Berkas/berkunjung (15-18)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITY		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SOBELUM	BESUDAH	RKPD 2025	APRO 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kapasitas ASN	Peningkatan kompetensi ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi				100 %	100 %	173.128.893,00	122.849.960,00	62.730.000,00	-101.439.976,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			275.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				10 Orang	22 Orang	22.400.000,00	13.000.000,00	7.500.000,00	-14.900.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			90.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			50.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lulusan ASN	Jumlah ASN yang Menamatkan Pendidikan Lulusan				7 Orang	8 Orang	120.000.000,00	69.000.000,00	60.000.000,00	-61.000.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	25.740.000,00	25.140.000,00	0,00	-26.740.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Rukun Jember - Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Menamatkan Lulusan Pengembangan Rukun				50 Orang	35 Orang	34.580.000,00	16.390.000,00	3.300.000,00	-31.790.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			35.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Enkues Kinerja Aparatur	Pemetaan Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan enkues Kinerja Aparatur yang dibutuhkan				100 %	100 %	60.480.000,00	48.830.000,00	7.230.000,00	-61.640.000,00		-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			110.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0002	Refleksi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Refleksi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	11.630.000,00	-1.650.000,00	-33.560.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pembinaan Pengawasan Internal Pegawai	Jumlah ASN yang Dibantu Pengawasan Internal				200 Orang	60 Orang	18.880.000,00	22.240.000,00	2.580.000,00	-17.810.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			50.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Pengelolaan Penyediaan Peningkatan Gaji ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Peningkatan Gaji ASN				1 Laporan	1 Laporan	24.340.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	-21.340.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.281.122.803,54	811.825.868,05	558.675.808,88	-442.447.385,09							946.800.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maka BAKOP Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota				77,66 %	77,88 %	5.138.680.94,08	55.180.634.81,00	57.681.489.148,38	-1.231.395.578,00							3.827.363.615,00	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan jumlah penduduk yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				-89 %	-89 %	35.900.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-10.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			45.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendataan dan Pemetaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pemetaan dan Pemetaan				5 Orang	5 Orang	30.900.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			45.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				30 %	30 %	1.185.122.803,54	591.825.868,05	538.675.808,88	-366.122.868,05							596.800.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kapasitas Tim	Peningkatan jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi				100 %	100 %	110.000.000,00	97.990.000,00	94.490.000,00	-15.010.000,00			-	-			200.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.01.2.003	Peningkatan Pengembangan Kompetensi Tim	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				75 Orang	75 Orang	110.000.000,00	97.990.000,00	94.490.000,00	-15.010.000,00	Kota Pangreh Pong, Sema Kecamatan, Sema Kari/Dasa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			200.000.000,00	BAGIAN KEMERGAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEMATAN / SUB KEMATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEMATAN / SUB KEMATAN	TARJAH PENGOLAH REMITRA OPD	REALISASI CAPAIAN INDIA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARJAH INDIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU TENDAH TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENGANGKUTAN JAWAB	
							TARJAH 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkurang/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY						
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2023	APUD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.94.02.2.02	Setelah, kelengkapan Pengerbangan: Korporasi Masyarakat dan Pengerbangan	Pengerbangan, jumlah Dokumen dan pelaksanaan aktivitas, monev/monev, pengembangan monev/monev dan fungsional				100 %	100 %	1.000.122.000,00	489.875.300,00	484.275.000,00	-57.847.300,00				-	Akuisisi Referensi Revisi dan Dokumentasi Daerah Akuisisi Referensi Revisi dan Dokumentasi Daerah		790.900.000,00	SARAN KEPERAWAN LAK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.94.02.2.02.9057	Pengerbangan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pejabat																			
			Jumlah Laporan hasil Pengerbangan Pengerbangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pejabat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.122.000,00	489.875.300,00	484.275.000,00	-57.847.300,00	Kota Pengkal Pangkal, Tembak Kawakitan, Sembud Piri/Casul	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akuisisi Referensi Revisi dan Dokumentasi Daerah Akuisisi Referensi Revisi dan Dokumentasi Daerah			790.900.000,00	SARAN KEPERAWAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah L & H						7.079.414.194,00	59.097.915.215,00	59.098.215.415,00	45.548.002.219,00							6.138.988.219,00		

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkalpinang.